

## Dampak Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah

Asmi Rahayu<sup>1</sup>, Puji Rahma<sup>2</sup>, Andi Muhammad Nurul Afdhal<sup>3</sup>, Eris Girawati<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Lamappapoleonro<sup>1,3</sup>

Program Studi Manajemen, Universitas Lamappapoleonro<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Banten<sup>4</sup>

Email: asmi.rahayu@unipol.ac.id<sup>1</sup>, puji.rahmah@unipol.ac.id<sup>2</sup>, afdhal@unipol.ac.id<sup>3</sup>,  
eris.girawati@institutbanten.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi tantangan besar, salah satunya terkait kebijakan pajak daerah yang dikenakan kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak daerah terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Soppeng. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive dan analisis uji Chi-square, penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak daerah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM, terutama terkait dengan pajak daerah yang dirasakan memberatkan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak hanya mempengaruhi kemampuan bertahan UMKM, tetapi juga menghambat potensi pertumbuhannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pajak yang lebih adil dan kondusif untuk mendukung perkembangan UMKM yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah merancang kebijakan pajak yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan menghindari pemungutan pajak yang berlebihan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pajak Daerah, Kinerja UMKM, Pajak Daerah, UMKM Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi.

### ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy but often face significant challenges, one of which is the local tax policies imposed on them. This study aims to analyze the impact of local tax policies on MSME performance in Soppeng Regency. Using a quantitative approach with purposive sampling technique and Chi-square test analysis, the study reveals that local tax policies significantly affect MSME performance, particularly concerning multiple taxation that is perceived as burdensome. The hypothesis testing results indicate that the tax policies implemented by the local government not only affect the survival ability of MSMEs but also hinder their growth potential. Therefore, tax policy reforms that are fairer and more conducive to supporting sustainable MSME development are necessary. This study suggests that local governments design tax policies that align with MSME capabilities and avoid excessive taxation.*

**Keywords:** Local Tax Policy, MSME Performance, Local Taxation, MSMEs Indonesia, Economic Growth

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara;

mereka memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai Masyarakat (Nursini, 2020; T. Tambunan, 2019; T. T. H. Tambunan, 2011). Tambunan

(2019) menyatakan bahwa UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil mendominasi sektor bisnis di Indonesia, dengan hampir 100% dari total jumlah perusahaan di negara ini. UMKM berkontribusi sekitar 58-61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, meskipun jumlahnya sangat besar, namun produktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa sekitar 73,96% UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka.

UMKM beroperasi di berbagai sektor usaha dan terkait dengan seluruh bagian perkembangan industri (BPS, 2024). Signifikansi UMKM dalam keberlanjutan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, inovasi teknologi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi serta standar hidup sangat diakui, terutama di negara-negara berkembang (Eniola & Ektebang, 2014; Iriyanti & Azis, 2012; Nursini, 2020)

Adanlawo dan Vezi-Magigaba (2022) menemukan bahwa UMKM berjuang untuk bertahan hidup dan mungkin akan berhenti beroperasi dalam waktu lima tahun karena masalah terkait pajak, mulai dari pajak berganda hingga beban pajak yang sangat besar. Tingkat kematian UMKM di antara negara-negara di Afrika sangat tinggi dengan lima dari tujuh usaha baru gagal di tahun pertama mereka (Adanlawo & Vezi-Magigaba, 2022; Muriithi, 2017). Hal serupa juga dihadapi oleh UMKM di Indonesia (Tambunan, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi masalah pajak sebagai salah satu faktor utama penutupan dini UKM (Inasius, 2019; Inasius & Nusantara, 2015; Le et al., 2024; M. Michael et al., 2025; Oladipupo & Obazee, 2016; T. Tambunan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Kelangsungan hidup sebagian besar UMKM sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk bertahan menghadapi masalah terkait pajak di tengah

tantangan ekonomi lainnya. Menurut Michael (2014), pemerintah daerah memperkenalkan berbagai jenis pajak dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, namun pajak-pajak tersebut cenderung memberikan dampak negatif terhadap bisnis kecil dan menengah. Untuk memastikan UMKM dapat bertahan dan terus beroperasi dengan lancar, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah, khususnya kebijakan pajak daerah yang mendukung pengembangan dan peningkatan usaha kecil ini untuk menjamin kelangsungannya secara maksimal.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa strategi pemerintah sering kali ditujukan untuk perusahaan besar, sementara bisnis kecil sering terabaikan (Adanlawo & Vezi-Magigaba, 2022; Adeusi & Aluko, 2014). Oleh karena itu, perlu diupayakan strategi yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, kondusif, dan teratur bagi UMKM agar dapat berkembang. Pengalihan strategi pemerintah terkait pajak daerah untuk meningkatkan UMKM akan mendorong dan mendukung bisnis kecil untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kebijakan pajak daerah mempengaruhi kinerja aktivitas bisnis UMKM, serta dampak tarif pajak daerah terhadap penciptaan UMKM dan kelangsungannya. Pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman dalam studi ini adalah: Apakah kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM?

Sejalan dengan pertanyaan penelitian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: Kebijakan pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja operator UMKM di Kabupaten Soppeng.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Pajak Daerah dan Pertumbuhan UMKM**

UMKM di Indonesia belum berhasil berkembang dengan signifikan dan belum

memainkan peran yang diharapkan dalam pertumbuhan ekonomi (Famiola & Wulansari, 2020; Iriyanti & Azis, 2012; Nursini, 2020). Pertumbuhan UMKM dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk peningkatan penjualan, keuntungan, atau jumlah pekerja (Wahyono, 2018). Untuk pertumbuhan penjualan, bisnis harus mampu mencatatkan peningkatan dalam penjualannya.

Pertumbuhan keuntungan UMKM terjadi ketika pendapatan usaha meningkat dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya setelah pajak dan semua biaya telah dikurangkan (Anggadwita & Mustafid, 2014)(Anggadwita & Mustafid, 2014). Sementara itu, pertumbuhan jumlah pekerja terjadi ketika bisnis berkembang seiring waktu dengan menambah jumlah pekerja, membayar pajaknya secara wajar, yang memungkinkan bisnis untuk meraih keuntungan dan memperluas usaha serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan (Wahyono, 2018).

Adanlawo, Reddy, dan Rugbeer (2021) menyatakan bahwa hubungan antara bisnis dan pertumbuhan ekonomi tercermin setiap kali operator bisnis menginvestasikan kembali keuntungan, sehingga membuat perekonomian menjadi lebih produktif dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kebijakan pajak dapat mempengaruhi aktivitas usaha kecil dengan berbagai cara. Dalam situasi di mana pendapatan usaha kecil, maka pengenaan pajak yang besar akan sangat mempengaruhi usaha tersebut .

Pajak Daerah bagi UMKM harus dilakukan dengan cara yang memperhatikan pendapatan dan kebutuhan UMKM. Agar sistem pajak efektif, kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga tarif pajaknya sesuai dan adil bagi semua pihak. Pajak yang dikenakan pada usaha kecil seharusnya lebih ringan dan upaya melawan korupsi serta penghindaran pajak harus lebih intens. Kebijakan pajak bisa disusun sedemikian rupa sehingga tidak hanya

mempengaruhi UMKM secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung mendorong kepatuhan serta keberlanjutan usaha itu sendiri (Ojeka, 2011).

Penting untuk dicatat bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting guna belanja pemerintah daerah, karena pajak daerah yang dipungut dari individu dan bisnis digunakan untuk menjalankan mesin pemerintahan, serta untuk menyediakan fasilitas seperti jalan yang baik, pasokan air, dan listrik (Md. Krisna Arta Anggar Kusuma & Ni Gst. Putu Wirawati, 2013; Sari & Rochmatullah, 2023; Syam, 2023). Namun terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengenakan pajak kepada UMKM, termasuk bagaimana kebijakan pajak ini dirancang untuk mendukung dan mempromosikan pertumbuhan UMKM serta cara terbaik untuk mengelolanya tanpa mempengaruhi pertumbuhan finansial mereka (Riduansyah, 2003).

## **2.2. Teori Institusi dan Pertumbuhan UMKM**

Kebijakan pajak daerah yang tidak tepat dapat memperburuk tantangan yang dihadapi oleh UMKM, yang juga terkait erat dengan teori institusi ekonomi oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2005). Kebijakan pajak daerah yang tidak tepat menciptakan (Inasius, 2019)ketidakstabilan yang memperburuk ketimpangan kekuasaan politik dan ekonomi, yang pada gilirannya menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang.

Pemerintah Daerah perlu memperbaiki struktur pajak daerah dan menyelaraskan tarif pajak agar lebih transparan dan adil. Reformasi ini akan mengurangi ketimpangan yang ada, memperkuat kualitas institusional, dan memberikan insentif yang lebih besar bagi UMKM untuk mendukung pengembangan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan (Sari & Rochmatullah, 2023).

Rasionalisasi teori ini dalam studi ini untuk memahami bahwa UMKM memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan negara jika bisnis tersebut memiliki kesempatan untuk berkembang. Ini mengimplikasikan kebutuhan untuk merancang kebijakan pajak yang lebih longgar untuk mendorong dan mendukung para wirausahawan menghadapi tantangan usaha (Famiola & Wulansari, 2020).

Teori institusi juga mengimplikasikan bahwa iklim usaha yang sehat akan merangsang aktivitas bisnis dan akan mengarah pada pertumbuhan dalam penjualan, keuntungan, dan jumlah karyawan (Maksum et al., 2020). Ketika mereka berkembang, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang untuk pemerintah melalui pajak dan juga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Fokus dari penelitian ini adalah pada UMKM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Soppeng. Terdapat 2.809 UMKM yang beroperasi di Kabupaten Soppeng (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024). Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster purposive sampling*. Creswell & Clark (2018) mendukung penggunaan sampling purposive karena memungkinkan peneliti untuk mencocokkan tujuan dan sasaran penelitian dengan kualitas subgrup yang ada. Kuesioner diserahkan dan diisi secara langsung kepada pemilik atau pengelola UMKM di tempat usaha mereka.

Karena sebagian besar variabel yang diperoleh dari survei kuesioner bersifat kategorikal (nominal dan ordinal), uji non-parametrik untuk asosiasi dan/atau perbedaan antara dua atau lebih sampel independen, seperti uji Chi-square, uji Mann-Whitney U, dan uji Kruskal-Wallis, digunakan untuk analisis (Pallant, 2010). Uji ini disarankan ketika data bersifat ordinal, ukuran sampel kecil, dan tidak ada persyaratan jumlah yang

sama dalam dua kondisi (Laeven & Woodruff, 2007).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden menunjukkan berbagai bentuk kepemilikan, namun kepemilikan perseorangan mendominasi kepemilikan dengan besaran 75,45% dari entitas sampel yang berpartisipasi. Sifat dari usaha mikro dan kecil adalah untuk bertahan hidup sendiri dan menunjukkan potensi orientasi kewirausahaan. Mesin pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini sering kali berwujud usaha satu orang. (Oyetola et al., 2013). Hasil ini juga sejalan dengan studi (Eierle & Haller, 2009) yang mengidentifikasi kepemilikan perseorangan sebagai dominasi utama pada UMKM.

Tabel 1: Struktur Kepemilikan Responden

Kepemilikan	Jumlah Responden	%
Perorangan	83	75.45
CV/Fa	19	17.27
PT	8	7.27
Total	110	100

UMKM muncul dari hasrat individu atau sekelompok orang untuk mencari nafkah dari ide yang dianggap sebagai usaha yang menguntungkan dan untuk memenuhi keinginan pribadi (Nursini, 2020). Sebagian besar UMKM di Indonesia memiliki modal awal yang kurang dari satu miliar rupiah, yang diperoleh dari tabungan pribadi dan sebagian kecil lainnya berasal dari pinjaman (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024). Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa 78.18% responden memulai bisnis mereka dengan modal kurang dari satu miliar rupiah.

Tabel 2: Besaran Modal Awal Responden

Tujuan	Jumlah Responden	%
Di bawah 1 Juta	72	65.45
1 Juta - 10 Juta	18	16.36
10 Juta -50 Juta	13	11.82
Di atas 50 Juta	7	6.36
Total	110	100

UMKM telah menjadi sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak pemuda dan kaum Perempuan (tambunan). Penyediaan pekerjaan bagi banyak pemuda di UMKM yang dinamis akan mengurangi kejahatan sosial dan tindak kriminal yang dipicu oleh pengangguran. UMKM memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi pemuda yang menganggur, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mendukung UMKM dengan insentif untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan (Bowale & Ilesanmi, 2013; Nursini, 2020).

Temuan dari Tabel 3 di bawah menunjukkan bahwa 75,45% responden memulai UMKM karena pengangguran. Sebanyak 34,5% responden menyatakan bahwa mereka bergabung dalam aktivitas UMKM karena tidak memperoleh pekerjaan yang menguntungkan, sementara 10% responden bergabung karena keinginan untuk mencari keuntungan. Temuan ini sesuai dengan studi longitudinal dan Quartey (2010) yang menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 75% lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang.

Tabel 3: Tujuan Mendirikan UMKM

Tujuan	Jumlah Responden	%
Karena pengangguran	41	37.27
Tidak memperoleh pekerjaan lain	36	32.73
Mencari keuntungan	33	30.00
Total	110	100

Pajak daerah merupakan faktor penting dalam pendapatan suatu daerah. Pajak dan retribusi sebagai kebijakan pemerintah daerah merupakan faktor yang signifikan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberadaan UMKM (Nuryanah et al., 2023). Tabel di bawah menunjukkan bahwa 65.45% UMKM membayar pajak kurang dari satu juta rupiah per tahun (dan bahkan tidak membayar pajak sama sekali), sementara 16,36% UMKM membayar dalam rentang 1 juta sd. 10 juta, 11,82% operator UMKM membayar dalam rentang 10 juta sd. 50 juta, dan 6,36% UMKM membayar lebih dari 50 juta.

Tabel 4: Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Tahunan Responden

Modal Awal	Jumlah Responden	%
Di bawah 1 Miliar	86	78.18
1 Miliar-5 Miliar	17	15.45
5 Miliar-10 Miliar	5	4.55
Di atas 10 Miliar	2	1.82
Total	110	100

Teramati bahwa UMKM membayar berbagai pajak dan retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Hal ini menyebabkan pajak daerah sangat mempengaruhi aktivitas para pengusaha UMKM. Tabel 5 di bawah menunjukkan bahwa 71.82% responden setuju bahwa pajak daerah memberikan dampak yang besar pada bisnis mereka, 11.82% responden mengungkapkan dampak ringan dari pajak daerah pada bisnis mereka, sementara 16.36% responden mengungkapkan bahwa pajak daerah tidak memberikan dampak yang signifikan pada bisnis mereka.

Tabel 5: Dampak Pajak Daerah pada UMKM

Dampak	Jumlah Responden	%
Berdampak besar	79	71.82
Berdampak ringan	13	11.82
Tidak berdampak	18	16.36
Total	110	100

### Uji Hipotesis

Tabel 6: Hasil Uji Chi-square

Dampak	Hasil
Berdampak besar	30,88
Berdampak ringan	17,77
Tidak berdampak	12,08
Total	60,72

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Chi-square yang dihitung (60,72) lebih besar dari nilai Chi-square tabel (12,59). Berdasarkan hasil ini, nilai  $X^2$  yang teramati lebih besar daripada  $X^2$  yang terhitung, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Soppeng ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah oleh pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Soppeng diterima. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian (Albab & Suwardi, 2021), yang menunjukkan bahwa kebijakan pajak pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM dan berkontribusi pada tingginya tingkat kematian UMKM.

### 5. SIMPULAN DAN SARAN

Kebanyakan UMKM merupakan usaha perseorangan, dan mereka memulai usaha mereka dengan modal awal yang terbatas, yang sebagian besar berasal dari tabungan pribadi mereka. Keterlibatan para pelaku UMKM umumnya didorong untuk mengurangi pengangguran dan mendukung produksi barang dan jasa untuk lingkungan sekitar mereka. Pajak daerah yang berat akan mempengaruhi UMKM dan pada akhirnya akan membuat mereka keluar dari perekonomian. Namun, agar usaha UMKM ini dapat bertahan dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi negara, pemerintah daerah perlu merancang dan menerapkan strategi yang dapat mendukung pertumbuhan segmen penting dalam perekonomian ini.

UMKM sangat penting dalam perekonomian setiap negara, selain menciptakan peluang kerja, mereka juga menyediakan barang dan jasa dengan berbagai pilihan untuk Masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan UMKM:

1. Pemerintah daerah harus bekerja sama untuk merancang dan menetapkan cara yang paling efektif dalam mengelola kebijakan pajak yang akan mendukung pertumbuhan UMKM.
2. Pemungutan pajak harus didefinisikan dengan jelas mengenai tingkat pemerintahan mana yang seharusnya memungut pajak tertentu dari pemilik UMKM untuk menghindari pajak daerah dari ketiga tingkat pemerintahan pada UMKM yang sama.
3. Pajak seharusnya dikenakan sesuai dengan pertumbuhan bisnis: penjualan, ukuran, dan keuntungan setiap usaha. Kemampuan UMKM dalam membayar pajak juga harus dipertimbangkan untuk menghindari penghindaran pajak.
4. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan peningkatan insentif dan pengecualian pajak untuk menarik investor dan juga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, pertama, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu dari 416 kabupaten di Indonesia. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan beberapa hasil mengenai dampak kebijakan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan beberapa hambatan utama yang hampir terabaikan dalam literatur terkait keberhasilan UMKM. Penelitian ini membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian masa depan mungkin dapat fokus pada bagaimana tarif pajak daerah

dapat menghalangi kaum muda untuk berwirausaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Chapter 6 Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. *Handbook of Economic Growth, I(SUPPL. PART A)*, 385–472. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01006-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3)
- Adanlawo, E. F., & Vezi-Magigaba, M. (2022). Exploring the impact of tax policies on small and medium scale enterprises' (SMEs) performance in Nigerian Economy. In *The Business and Management Review* (Vol. 13).
- Adeusi, S. O., & Aluko. (2014). *Assessing the Role of Government in Promoting Small Scale Businesses in Kogi State: The Kabba/Bunu Experience* (Vol. 16). [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org)
- Aribaba, F. O., Oladele, R., Ahmodu, A.-L. O., & Yusuff, S. A. (2019). Tax policies and entrepreneurship sustainability in Ondo State, Nigeria. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40497-019-0168-0>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Selatan 2022*. <https://sulsel.bps.go.id/id/publication/2024/01/30/4c40b1625205e41d29f192e4/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-sulawesi-selatan-2022.html>
- BPS. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research. In *Encyclopedia of Research Design*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412961288.n245>
- Eierle, B., & Haller, A. (2009). Does Size Influence the Suitability of the IFRS for Small and Medium-Sized Entities? – Empirical Evidence from Germany. *Accounting in Europe*, 6(2), 195–230. <https://doi.org/10.1080/17449480903115779>
- Eniola, A., & Ektebang, H. (2014). SME firms performance in Nigeria: Competitive advantage and its impact. *International Journal of Research Studies in Management*, 3(2). <https://doi.org/10.5861/ijrsm.2014.854>
- Famiola, M., & Wulansari, A. (2020). SMEs' social and environmental initiatives in Indonesia: an institutional and resource-based analysis. *Social Responsibility Journal*, 16(1), 15–27. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2017-0095>
- Laeven, L., & Woodruff, C. (2007). The Quality of The Legal System, Firm, Ownership, and Firm Size. *The Review of Economics and Statistics*, 89(4), 601–614.
- Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3). <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>
- Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, & Ni Gst. Putu Wirawati. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(5), 574–585. <https://doi.org/2302-8556>
- Michael, O. (2014). Multiple Taxation as a Bane of Business Development in Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n1p121>
- Muriithi, S. M. (2017). African Small and Medium Enterprises (SMEs) Contributions, Challenges and Solutions. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 5(1). [www.idpublications.org](http://www.idpublications.org)
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166.

- <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Ojeka, S. A. (2011). Tax Policy and the Growth of SMEs: Implications for the Nigerian Economy. *Research Journal of Finance and Accounting*, 2(2). [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Pallant, J. (2010). *SPSS Survival Manual*. McGraw-Hill. [www.openup.co.uk/spss](http://www.openup.co.uk/spss)
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Sari, R. A., & Rochmatullah, M. R. (2023). Analysis Of The Effect Of Local Tax Revenue And Local Retribution On The Human Development Index Of Districts And Cities In Central Java Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5983–5994. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Syam, M. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Cendekia Akademika Indonesia*, 2, 318–332. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/cai>
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Tambunan, T. T. H. (2011). Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. *Journal of Enterprising Communities*, 5(1), 68–82. <https://doi.org/10.1108/17506201111119626>